

# **Implementasi Pemberdayaan Sosial Berbasis Keluarga Program Keluarga Harapan di Kec. Tigo Lurah, Sumatera Barat**

Jafrianto, Jendrius, Indraddin  
Magister Sosiologi Universitas Andalas, Padang, Indonesia  
jefripadang945@gmail.com

## **Abstract**

This research was motivated by one of the objectives of PKH to create behavioral change and the independence of beneficiary families in accessing social education, health and welfare services. To achieve this change, PKH issued a program called the Family Development Session. Family Development Session is a community learning process to strengthen the increase in knowledge, public understanding of the importance of education, health and financial management for families so that they are free from poverty and can meet the needs of life independently. The purpose of this study is to describe the implementation and identify obstacles in the process of family-based social empowerment (Family Development session) in the district of Tigo Lurah. This study uses a qualitative approach with descriptive research type. Informants in this study were taken using a purposive sampling method. From the results of the study it was concluded that the family-based social empowerment (Family Development Session) of the Harapan family program in the Tigo Lurah sub-district was carried out through three stages, the first stage of awareness raising and behavior formation, the second stage of knowledge transformation, the third stage of capacity building. The obstacles of empowerment found in this research are that there is no good cooperation between the empowerment actors with the local government, no separate budget, lack of facilities and infrastructure and a lack of support from the leaders and the surrounding community.

**Keywords:** Family Development Session, Tigo Lurah, implementation

## **Abstrak**

Salah satu tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai perubahan tersebut, PKH mengeluarkan program yang bernama *Family Development Session*, yang merupakan proses belajar masyarakat untuk memperkuat terjadinya peningkatan pengetahuan,

pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi keluarga sehingga terlepas dari kemiskinan dan bias memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi dan mengidentifikasi kendala dalam proses pemberdayaan sosial berbasis keluarga di kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa program tersebut dilakukan melalui tiga tahapan; pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku; kedua, tahap transformasi pengetahuan; ketiga, tahap peningkatan kemampuan. Adapun hambatan pemberdayaan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu belum terjalannya kerjasama yang baik antara aktor pemberdaya dengan pemerintah daerah, tidak memiliki anggaran tersendiri, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya dukungan tokoh dan masyarakat sekitar.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Berbasis Keluarga, Tigo Lurah, implementasi

## **Pendahuluan**

Di berbagai Negara, pemerintah berupaya memberikan perhatian terhadap perlindungan sosial, khususnya pada masyarakat miskin. Kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah untuk perlindungan sosial yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, bukan hanya terjadi pada masyarakat miskin, tetapi juga pada Negara berkembang dan juga Negara maju<sup>1</sup>.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut UU SPPN) mengatakan bahwa salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Pembangunan merupakan bentuk konkrit dari pertanggung jawaban tersebut. Pembangunan merupakan segala upaya yang terus-menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi<sup>2</sup>.

Ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi kemiskinan masih sulit untuk diminimalkan. *Pertama*, kondisi anggota masyarakat yang belum ikut

---

<sup>1</sup> Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia, Sekarang dan ke Depan* (Bandung: Fokusmedia, 2012), 19.

<sup>2</sup> Mardikanto dan Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), 25.

serta dalam proses yang berkualitas, faktor produksi yang memadai, *kedua* rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pedesaan, dan *ketiga* pembangunan yang direncanakan pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga tidak dijangkau oleh masyarakat<sup>3</sup>. Oleh karena itu harus dilakukan upaya-upaya atau strategi terobosan baru oleh pemerintah maupun pihak terkait untuk secepatnya membantu masyarakat membangkitkan kesadaran dan potensi yang dimilikinya agar dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

Diantara program-program sosial kemasyarakatan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan tersebut, satu program yang diharapkan tepat sasaran adalah Program Keluarga Harapan (PKH), karena didalam program tersebut menysasar dua hal, yaitu memberikan bantuan langsung tunai, dan juga memberikan pendampingan dalam upaya pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. PKH menysasar kelompok Keluarga Sangat Miskin (KSM) / Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), yang berada pada lapisan masyarakat paling bawah.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program kemiskinan yang terakhir diluncurkan adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) diutamakan bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/menyusui, dan anak usia 0-15 tahun, atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya. Penerima bantuan PKH adalah ibu-ibu rumah tangga sangat miskin. Tujuan jangka pendek PKH adalah memberikan *income effect* melalui pengurangan beban pengeluaran RTSM. Sementara tujuan jangka panjangnya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan RTSM melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak (*price effect*) serta memberikan kepastian akan masa depan anak (*insurance effect*) dan mengubah perilaku (*behaviour effect*) keluarga miskin<sup>4</sup>. Program Keluarga

---

<sup>3</sup> Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat* (Jakarta: Indeks, 2010), 42.

<sup>4</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Operasional Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2013* (Jakarta: Kemensos RI, 2013).

Harapan (PKH) ini lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun system perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan danmeningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upayamemotong mata rantai kemiskinan.

PKH mempunyai Pemberdayaan Sosial yang dikenal dengan *Family Development Session (FDS)* yang merupakan proses pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat dengan menyampaikan dan membahas informasi praktis dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga. Menggunakan metode *blended learning* yaitu memanfaatkan media video animasi, proses diskusi dan dialog antar peserta dan narasumber yang kompeten, maka FDS dirasa mampu menjadi formula demi peningkatan kapasitas diri peserta PKH<sup>5</sup>.

Pertemuan FDS merupakan sebuah bentuk pemberdayaan yang melekat dengan PKH, yang sejak tahun 2016 dilaksanakan di seluruh kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pemberdayaan adalah pilihan, kebebasan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, martabat, penghargaan, kerjasama dan rasa saling memiliki pada komunitas<sup>6</sup>. Pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat untuk memperkuat kapasitas diri dan kelompok dalam berbagai hal, mulai dari sosial kelembagaan, kepemimpinan, sosial ekonomi dan politik dengan menggunakan basis sendiri<sup>7</sup>.

Dampak positif PKH secara nyata adalah pemenuhan kebutuhan dasar keluarga sangat miskin, tapi belum maksimal terutama yang berhubungan dengan faktor kultural dalam kemiskinan itu sendiri. PKH belum menyentuh perubahan pola pikir keluarga penerima manfaat terhadap masa depan serta upaya untuk meningkatkan etos kerja melalui pendidikan keluarga.

Uji coba pelaksanaan FDS dimulai pada tahun 2014 di 3 provinsi yaitu DKI, Jawa Barat, dan Jawa Timur pada 122 Kecamatan di 33 Kabupaten. Di Sumatera Barat pada tahun 2015 telah dilakukan diklat FDS

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Julian Gonsalves dkk., ed., *Participatory Research and Development for Sustainable Agriculture and Natural Resource Management - A Sourcebook Volume 1: Understanding Participatory Research and Development* (Philippines: International Potato Center-Users' Perspectives With Agricultural Research and Development, 2005).

<sup>7</sup>Syahyuti, *Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan* (Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2007), 33.

kepada pendamping dan action dari kegiatan FDS ini mulai dilakukan pada tahun 2016. Satu-satunya Kabupaten di Sumatera Barat yang menjalankan program FDS ini adalah Pesisir Selatan pada Kecamatan Lenggayang<sup>8</sup>.

Beberapa penelitian dapat membuktikan keberhasilan program FDS. Salah satunya yang dilakukan Pambid<sup>9</sup> didapatkan hasil bahwa melalui program FDS ini penerima merasakan dampaknya terhadap pencegahan penyakit pada anak-anak, nutrisi, dan pengelolaan limbah melalui penerapan praktik-praktik yang tepat.

*Family Development Sesion* dilaksanakan oleh para pendamping yang telah dilatih dari Balai Diklat Regional I. Proses pelaksanaan FDS yang dilakukan pendamping adalah melakukan pendampingan kepada masyarakat melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam modul FDS yang dikeluarkan kementerian sosial<sup>10</sup>. Namun pada kenyataannya berdasarkan observasi awal dilapangan, pendamping tidak melakukan semua tahapan yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan FDS program PKH tidak tercapai secara optimal dan berdampak terhadap masih rendahnya capaian target FDS pada berbagai bidang.

Penelitian yang dilakukan Rahmawati dan Kisworo<sup>11</sup> menjelaskan bahwa keberhasilan program PKH dipengaruhi oleh peran serta pendamping karena pendamping pelaksana program PKH dibekali dengan empat keterampilan yaitu peran fasilitatif, pendidik, representatif atau perwakilan masyarakat dan teknis. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat ketidakberhasilan PKH adalah sulitnya pengumpulan berkas data peserta, dan beradaptasi dengan lingkungan baru pendamping memerlukan waktu

---

<sup>8</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Operasional Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2015* (Jakarta: Kemensos RI, 2015).

<sup>9</sup> R Pambid, "Level of Application of Family Development Session to Pantawid Familyang Pilipino Proram (4P's) Beneficiaries," *PSU Journal Of Education, Management and Sosial Sciences* 1, no. 1 (t.t.): 15–25.

<sup>10</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Operasional Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2011* (Jakarta: Kemensos RI, 2011).

<sup>11</sup> Evi Rahmawati dan Bagus Kisworo, "Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan," *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 1, no. 2 (30 Desember 2017): 161–69, doi:10.15294/pls.v1i2.16271.

yang lama. Suwinta dan Prabawati<sup>12</sup> dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab ketidakberhasilan Program Keluarga Harapan adalah kurangnya kesadaran peserta PKH terhadap pentingnya PKH, serta adanya permasalahan internal antara pelaksana pusat dan daerah.

Menurut buku pedoman Umum Program Keluarga Harapan Pengertian *Family Development Session* (FDS) merupakan proses belajar peserta PKH berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yang disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan. Tujuan dari *Family Development Session* (FDS) adalah: (1) Meningkatkan Pengetahuan praktis mengenai kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. (2) Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, (3) Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan keluarga (4) Meningkatkan ketrampilan orang tua dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan keluarga, (5) Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengenali potensi yang ada pada dirinya dan lingkungannya agar dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan keluarganya dan masyarakat, (6) Memberikan pemahaman kepada peserta untuk menemukan potensi lokal agar dapat dikembangkan secara ekonomi.

Kegiatan *Family Development Session* (FDS) ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran memang seringkali berlangsung lambat, tetapi perubahan yang terjadi akan bertahan lama. Proses belajar dalam pemberdayaan bukanlah proses “menggurui”, melainkan menumbuhkan semangat belajar bersama yang mandiri dan partisipatif. Kegiatan pemberdayaan melalui proses pembelajaran dilihat dari seberapa jauh dialog, diskusi atau pertukaran pengalaman yang terjadi antara fasilitator dan penerima manfaat, dimana fasilitator tidak harus pejabat yang berkuasa tetapi dapat berasal dari orang biasa yang memiliki kelebihan atau pengalaman yang layak dibagikan<sup>13</sup>. Strategi pemberdayaan ini melalui proses pembelajaran lebih mengacu pada

---

<sup>12</sup> Antriya Eka Suwinta, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar,” *Publika* 3, no. 8 (1 November 2016), <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/13711>.

<sup>13</sup> Mardikanto dan Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*, 35.

kebutuhan masyarakat, untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya masyarakat guna mencapai kesejahteraan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Pemberdayaan Sosial *Family Development Session* di wilayah Kec.Tigo Lurah, Kab. Solok, Prov. Sumatera Barat.

## **Hasil dan Pembahasan**

Implementasi pemberdayaan sosial berbasis keluarga (*Family Development Session*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana proses atau upaya untuk membangun, mendorong, membangkitkan kesadaran, memotivasi, merubah pola pikir, sikap, prilaku serta memampukan dan memandirikan penerima Program Keluarga Harapan untuk lepas dari kemiskinan. Memampukan yang dimaksud di sini ialah melakuakn sebuah pemberdayaan sosial dengan memberikan suatu program dengan komitmen, sehingga masyarakat mulai sadar akan pentingnya kehadiran sebuah program. Sedangkan memandirikan yang dimaksud adalah masyarakat yang telah atau belum peduli akan program dapat meningkatkan status untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan baik.

### **1. Implementasi Pemberdayaan Sosial Berbasis Keluarga (*Family Development Session*)**

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh manajemen yang baik. Ada beberapa tahapan yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik pelaksanaan yang ada dalam mengimplementasikan pemberdayaan sosial berbasis keluarga (*Family Development Session*).

#### **a. Tahap Penyadaran dan Pembentukan Prilaku**

Pada tahap ini pemberdaya aktor atau pelaku pemberdaya berusaha menciptakan dan memfasilitasi agar terciptanya proses pembedayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan membuka keinginan dan kesadaran penerima Program keluarga Harapan tentang kondisi saat ini dengan demikian akan dapat merangsang mereka tentang perlunya memperbaiki diri untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sentuhan kesadaran dapat berupa semangat diharapkan dapat mengantarkan masyarakat untuk sampai kesadaran dan kemampuan untuk hidup mandiri.

Pada tahap penyadaran Pendamping PKH memberikan penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan pemberdayaan sosial berbasis keluarga yang PKH lakukan di Kecamatan Tigo Lurah. Pada pertemuan awal diisi dengan sosialisasi program FDS yaitu menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan FDS, kewajiban yang harus dipenuhi oleh perima program dan sanksi yang didapat jika tidak memunugi syarat yang telah ditetapkan bagi penerima bantuan program harapan.

Berikuti ini informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping program PKH dengan bapak Herman mengemukakan bahwa

“Nama-nama dari penerima bantuan PKH kami bagi perkelompok 20 – 30 orang dan dibuat jadwal pertemuan. Setelah keluarga peserta program harapan berkumpul, kami memberikan arahan terkait dengan program FDS, kewajiban yang harus dilaksanahn peserta dan sanksi yang diterima saat mereka tidak hadir pertemuan ”

Berdasarkan hasil wawasan cara di atas dapat diperoleh informasi bahwa nama-nama peneriman PKH dibagi perkelompok dengan jumlah 20 - 30 orang lalu dibuat jadwal pertemuan. Pada saat pengumpulan dilakukan oleh pendamping, pendamping memberikan penyadaran kepada kepada penerima PKH tentang pentingnya mengikuti semua kegiatan yang telah ditetapkan oleh program PKH dan memberikan jelasan tetang sanksi yang akan diiterima jika peserta PKH tidak mengikuti sesuai dengan program

Pada saat pengumpulan peserta pendamping juga menyapaikan tujuan dan sasaran Program Keluagar harapan melalui pemberdayaan sosial berbasis keluarga ini seperti yang disampikan oleh Herman selaku pendamping PKH.

“program Keluarga Harapan bertujuan untuk mempercepat pengetasan kemiskinan, yang utamanya adalah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan, merubah pola piker bahwa masyarakat miskin itu tidak hanya bisa menerima bantuan dari pemerintah saja tetapi masyarakat miskin itu bisa bekerja dan mampu merubah diri mereka dan mereka harus berpikir bahwa mereka adalah keluarga harapan bangsa”.

Pada saat pengumpulan awal yang dilakukan pendamping PKH, banyak sekali PKH belum tahu tentang program PKH yang dilakukan oleh



pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada penerima PKH, Asnimar (umur 38 tahun ) menyebutkan bawah

“memang wak yo indak urang mampu, untuk kebutuhan sehari-hari ndak bisa wak ndak cukuik do. Tapi wak sanang bana, dapek bantuan dari program PKH yang diagiah tahu oleh pihak pendamping. Disitu awak diagih tahu baa caro prosedur maikuti program PKH yang harus wak jalankan dan sanksi apo yang ditarimo agar awak bisa bertahan menjadi anggota PKH.

Hasil wawancara dengan Asnimar di atas menyebutkan bahwa banyak sekali para perima PKH yang belum tahu tentang tujuan program PKH,. Disamping itu, masyarakat juga sangat senang mendapatkan bantuan yang didiberikan oleh pemerintah, Karena Ibu Asnimar memiliki 5 orang anak, keempat anaknya juga masih sekolah, sehingga dia kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pendamping di Kecamatan Tigo Lurah, diberikan pelatihan bagaimana cara menyadarkan masyarakat RTSM agar mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya baik dari segi pendidikan, kesehatan dan ekonomi, sehingga mereka dapat menjadi mandiri dan tidak bergantung terhadap pemerintah.

Pemberdaya atau aktor harus mampu meningkatkan kesadaran penerima keluarga harapan akan pentingnya kegiatan pemberdayaan seperti dalam hal pengasuhan anak, mengatur ekonomi keluarga, perlindungan anak, kesehatan dan gizi serta tentang kesejahteraan lansia. Sebagaimana disampaikan Wilson, bahwa kegiatan pemberdayaan harus mampu menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, menumbuhkan kemampuan dan keberanian untuk melepaskan diri dari semua kondisi yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan sesuai yang diharapkan.

Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Pada tahap ini pemberdayaan harus mampu meningkatkan kesadaran pada RTSM peserta PKH akan pentingnya kegiatan pemberdayaan dalam hal ini pengasuhan anak, pendidikan dan kesehatan. Untuk menunjang semua kegiatan ini, UPPKH Kabupaten Solok Kecamatan Tigo Lurah, sudah menugaskan para pendamping FDS Kecamatan Tigo Lurah untuk dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan melalui program

FDS. Dengan semua pengalaman di lapangan, dengan pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti oleh pendamping, maka diharapkan kegiatan FDS di Wilayah Tigo Lurah berjalan dengan baik.

Dalam tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar, pendamping berperan berusaha menciptakan pra kondisi, supaya dapat memfasilitas berlangsungnya proses pemberdayaan yang lebih baik. Sebelum pendamping melakukan pendampingan kepada para RTSM, pendamping terlebih dahulu diberikan pelatihan-pelatihan yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran yang disebut *Family Development session* (FDS). Dengan menerapkan metode pembelajaran andragogi yaitu pembelajaran orang dewasa, materi-materi dalam FDS akan dirakan mudah, ringan, dan santai sehingga mudah dipahami dan diserap kademngan baik oleh para peserta PKH yang mengikuti.

Pemberdayaan harus mampu meningkatkan kesadaran para RTSM peserta PKH akan pentingnya kegiatan pemberdayaan dalam hal pengasuhan, mengatur ekonomi keluarga, perlindungan anak dan juga kesehatan. Kegiatan pemberdayaan harus mampu menumbuhkan keinginan para diri sendiri untuk berubah dan memperbaiki, memnubuhkan kemaunan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan atau kenikmatan dan atau hamabatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan<sup>14</sup>

Partisipasi masyarakat RTSM bertatap muka langsung dengan pendamping kegiatan FDS dalam rangka atau acara sosialisasi yang bertujuan untuk menjabarkan dan menjelaskan tujuan dalam program FDS. Serta adanya kesepakatan pelaksana program dengan KPM dalam pelaksanaan proram, bahwa KPM bersedia hadir dalam setiap kegiatan program DFS. Kesepakatan merupakan perjanjian yang dilakukan dua pihak dalam menjalankan sesuatu. Dalam hal ini terlihat sebuah kesadaran masyarakat dalam melakanakan kegiatan FDS.

### **b. Tahap Transformasi Pengetahuan dan Kecakapan**

Pada tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan ini pendamping memberikan pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan dan kecakapan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan PKH yang dilaksanakan.

---

<sup>14</sup> Ibid., 47.

Pemberdayaan PKH ini diselenggarakan untuk mencapai kondisi masyarakat dimana transformasi sosial budaya, dan ekonomi dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara berkelanjutan pengembangan kelompok untuk peserta PKH yaitu pertemuan FDS.

Pada tahap ini, para penerima program PKH akan dibagi dalam kelompok-kelompok, dimana kelompok tersebut beranggotakan antara 15 sampai dengan 20 anggota. Pembagian kelompok ini bertujuan untuk memudahkan proses komunikasi terkait dalam program FDS. Kelompok yang sudah dibentuk kemudian melakukan pertemuan rutin 1 kali dalam sebulan dengan para pendamping program untuk membahas masalah terkait dengan program FDS dan melakukan diskusi serta simulasi tentang pentingnya kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup yang lebih baik sehingga dengan adanya program FDS ini meningkatkan taraf kehidupan penerima PKH.

Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Herman sebagai pendamping PKH di Kecamatan Tigo Lurah menyatakan bahwa

“jadi setelah proses sosialisasi, kami bentuk mereka menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 15-20 orang, kemudian kami adakan pertemuan rutin setiap sebulan 1 kali untuk melakukan diskusi tentang modul FDS yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pertemuan biasanya saya memberikan terkait dengan pentingnya kesehatan dan pentingnya pendidikan bagi kesejahteraan bagi keluarganya. Jangan sampai nanti kehidupan mereka sama dialamai oleh anaknya nantinya”.

Pembagian kelompok dibentuk berdasarkan domisili atau tempat tinggal, yaitu berdasarkan desa dan RT/RW. Kelompok yang dibentuk terdiri dari 15-20 orang dalam satu kelok. Setelah terbentuk maka setiap kelompok secara bergantian mengadakan pertemuan rutin dengan para pendamping program untuk masing-masing kecamatan. Para pendamping ini bertugas untuk membahas semua program keluarga harapan, dan membagikan modul yang diberikan oleh pemerintah.

Kegiatan pemberdayaan kelompok PKH dengan melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (FDS) yaitu proses pembelajaran untuk kelompok serta PKH dalam meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidupnya. Dalam pertemuan kelompok bertempat di Kecamatan Tigo Lurah, dalam kegiatan pengelompokkan masing-masing peserta ke dalam kelompok

terdiri dari 15-20 peserta PKH. Dalam pemilihan kelompok peserta PKH pendampinglah yang berhak menentukan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang telah ditetapkan oleh pendamping. Pengembangan kapasitas peserta PKH melalui FDS merupakan proses pembelajaran yang praktis (pengetahuan) di bidang ekonomi, pendidikan anak, kesehatan dan perlindungan anak yang disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan dan dilakukan kepada peserta PKH yang masuk tahap transisi.

Tujuan FDS ini yaitu meningkatkan pengetahuan praktis peserta PKH tentang pengelolaan keuangan keluarga, pendidikan anak, gizi dan kesehatan serta perlindungan meningkatkan kesadaran peserta PKH akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif serta meningkatkan keterampilan orang tua. Kegiatan FDS ini dilaksanakan satu bulan sekali perkelompok anggota PKH. Jadwal tersebut sudah dirancang sedemikian rupa untuk memaksimalkan penyerapan materi demi hasil yang didasarkan dalam kegiatan FDS. Berikut penuturan Heman sebagai pendamping sebagai berikut:

“kegiatan pemberdayaan untuk peserta PKH ini melalui FDS yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ini merupakan proses pembelajaran untuk kelompok peserta PKH. Materi pembelajaran FDS ini terdiri dari empat modul yaitu dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan satu bulan sekali pertemuan”.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan untuk peserta PKH melalui FDS dilakukan satu bulan sekali pertemuan, FDS ini merupakan tempat belajar bagi peserta PKH, dengan menyampaikan materi pembelajaran yang terdiri empat modul, kegiatan FDS ini memberikan pengetahuan, pembelajaran, bimbingan, sosialisasi dan penyuluhan kepada peserta PKH. Dengan mengikuti kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pendamping kepada peserta PKH ini akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah perilaku peserta PKH menjadi lebih baik.

Materi pembelajaran FDS yang diberikan kepada peserta PKH dalam kegiatan pemberdayaan ini terdiri dari empat modul yang terbagi menjadi beberapa sesi yaitu bidang pendidikan. Materi pembelajaran FDS dibidang pendidikan yaitu menjadi orang tua yang baik itu memberikan pelajaran bahwa orang tua memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku anak,

memahami perilaku anak ada dua cara yaitu cara meningkatkan perilaku baik anak dan cara mengurangi perilaku buruk, serta memahami cara anak usia dini belajar dengan memberikan gambaran bermain sebagai media untuk anak belajar.

Para peserta PKH sangat termotivasi sekali dalam mendengarkan penjelasan dari pendamping PKH tentang bagaimana cara mendidik dan mengasuh anak yang baik, ditambah dengan adanya pemutaran video. Disamping itu para peserta juga dilakukan diskusi, sehingga mereka dapat mengemukakan permasalahan yang dihadapinya selama proses mendidik dan mengasuh anak yang mereka hadapi di lingkungannya. Disamping itu, para peserta lebih aktif dalam mengemukakan pendapat dan saling membantu antar sesama kelompok.

Pada tahap ini penerima Program Keluarga Harapan hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat rendah, yaitu sekedar pengikut atau objek pembangunan saja. Dalam pelaksanaannya penerima PKH sudah mulai menerapkan apa yang disampaikan oleh pendamping atau aktor. Seperti halnya pada pengasuhan dan pendidikan anak, KPM sudah menyadari pentingnya pengasuhan anak sejak usia dini dan mulai memperhatikan bagaimana dengan pendidikannya dengan memasukan ke sekolah play group dan PAUD.

PKH di bidang kesehatan mensyaratkan peserta PKH yaitu ibu hamil nifas dan anak usia kurang dari enam tahun untuk melakukan kunjungan rutin ke berbagai sarana kesehatan. Oleh karena itu, program ini langsung akan mendukung ketercapaian target program kesehatan. Sesi dalam bidang kesehatan yaitu berikut pernyataan yang diungkapkan informan Gustima (pendamping PKH) dalam wawancara ia mengatakan sebagai berikut

“dalam bidang kesehatan ini, dalam sesi gizi ibu hami, pelayanan ibu hamil, persalinan dan masa nifas serta makanan pendamping asi. Disini saya memberikan informasi bagaimana gizi serimbang untuk kandungamn dan tidak pua meminum tablet penambah darah, melakukan kunjungan kehamilan, memahami pentingnya melahirkan di fasilitas dan sarana kesehatan dan mampu memahami pentingnya memberikan makanan pendamping bagi bayi”.

Hal ini juga diungkapkan oleh informan Hetman (pendamping PKH) dalam wawancara ia mengatakan sebagai berikut:

“dalam program ini peserta PKH diberikan pelayanan kesehatan baik secara aktif maupun pasif kepada semua peserta PKH yang tidak hadir untuk diberikan pelayanan dan pembinaan. Secara pasif dengan cara memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta yang mendatangi fasilitas kesehatan. Syarat bantuan kesehatan seperti melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak empat kali selama masa kehamilan, proses kelahiran bayi, ibu yang melahirkan diperiksa kesehatannya dua kali, imunisasi, mendapatkan vitamin dan melakukan penimbangan secara rutin setiap tiga bulan sekali”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa di dalam bidang kesehatan, peserta memahami pentingnya makan-makanan bergizi seimbang, makanan pendamping bayi dan melakukan kunjungan kehamilan. Para peserta diberikan pelayanan kesehatan dengan baik dengan melakukan pemeriksaan kehamilan, memberikan imunisasi, proses kelahiran bayi, pemeriksaan kesehatan ibu yang melahirkan dan melakukan penimbangan secara rutin.

Kebiasaan baik yang juga dipraktikkan oleh KPM terlihat dari tingkat kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak semakin baik. Para bumil menjadi rajin untuk memeriksa kehamilannya pada bidan desa atau puskesmas, tidak lagi menggunakan dukun beranak pada saat mau melahirkan akan tetapi sudah menggunakan jasa dokter atau bidan terdekat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pendamping atau aktor.

Peserta KSM akan diajarkan bagaimana mengatur pendapatan dan pengeluaran keuangan yang seimbang dengan cara mampu memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. KSM juga diberikan pengetahuan untuk menyusun anggaran rumah tangga yang seimbang seperti menghitung rata-rata pendapatan dan pengeluaran bulanan, membuat anggaran bulanan berdasarkan prioritas pengeluaran dan mengendalikan pengeluaran sesuai anggaran tersebut.

Mengelola keuangan keluarga merupakan keterampilan dasar yang perlu dimiliki setiap rumahtangga, terutama rumahtangga miskin. Umumnya masalah keuangan mereka adalah lebih besarnya pengeluaran dibanding pendapatan, serta tidak teraturnya jumlah dan waktu menerima pendapatan. Pengelolaan keuangan membantu mereka untuk lebih terampil mengatur prioritas penggunaan uang agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan, sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi.

Peserta yang telah mengetahui cara menghitung dan mencatat pendapatan dan pengeluaran serta mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan dan jenis-jenis pengeluaran; menyusun anggaran dengan memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan; serta mengendalikan anggaran dengan membuat catatan kas harian. Hal ini diharapkan peserta PKH memperoleh pengetahuan dan keterampilan mengelola keuangan yang terbatas sehingga dapat terbebas dari permasalahan keuangan. Namun demikian peserta PKH diharapkan untuk membuat catatan kas harian agar dapat mengetahui jumlah pengeluaran dan pemasukan sehari-hari. Dengan begitu peserta PKH dapat mengatur keuangannya

Bidang ekonomi yang terdapat tiga sesi, dimana sesi mengelola keuangan keluarga, dapat membantu peserta untuk mengatur pengeluaran agar seimbang dengan pendapatan dengan cara menghitung pendapatan rata-rata satu bulan dan pengeluaran selama satu bulan. Sesi cermat meminjam dan menabung, dimana peserta harus jeli mencari tempat meminjam yang tepat dan berusaha membangkitkan kesadaran agar pentingnya menabung secara rutin dan disiplin sebagai salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan berhutang kembali.

Membangun keterampilan meminjam uang secara terencana dan hati-hati agar tidak lantas terjebak hutang, pendamping berusaha memberikan wawasan tentang tempat meminjam yang tepat dan juga berusaha membangkitkan kesadaran peserta akan pentingnya menabung secara rutin dan disiplin sebagai salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan berhutang kembali. Kebutuhan hidup yang semakin lama semakin meningkat, namun tidak diimbangi dengan pemasukan yang bertambah, maka kita untuk mencari tambahan dana untuk menutupi kekurangan keuangan dalam keluarga. Berhutang adalah salah satu cara cepat dalam mengatasi hal tersebut. Dalam sesi ini, pendamping menyampaikan bagaimana cara meminjam/berhutang dengan bijak, tanpa harus merugikan keuangan keluarga nantinya.

Selama pendampingan peserta dibantu memahami dasar-dasar untuk memulai, mengembangkan, dan memantau keberlanjutan usaha agar dapat menjadi sumber pendapatan keluarga. Dimana langkah perencanaan usaha yang dipelajari meliputi: mengidentifikasi, mengembangkan, dan menilai kelayakan ide usaha, merencanakan keuangan dan pemasaran usaha serta mengelola usaha Dalam modul pengelolaan keuangan dan perencanaan

usaha RTSM di berikan pengetahuan dasar untuk mengasah ketrampilan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran sehingga mampu mengurangi permasalahan keuangan dalam keluarga serta mampu merencanakan sebuah usaha demi tercapainya kehidupan ekonomi yang mandiri.

Pemberdayaan tentang mengatur keuangan keluarga juga melalui dipraktekan oleh KPM dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ekonomi masing-masing. Dengan pengetahuan tentang membedakan antara “keinginan dan kebutuhan” yang didapat dalam proses pemberdayaan sehingga KPM sudah lebih bijak dalam membelanjakan uang yang mereka miliki. Begitu pula dengan perlindungan anak, orang tua semakin pandai mengendalikan emosi terhadap anak-anak mereka, dulu yang sebelumnya sering membentak, memukul, mencubit anaknya karena kesalahan yang diperbuat oleh anak-anaknya, sekarang para orang tua sudah santun dalam bertindak sehingga terhindar dari kekerasan sedini mungkin. Modul terakhir yaitu dalam bidang kesejahteraan keluarga ini terdapat dua sesi diantaranya yaitu pencegahan kekerasan terhadap anak, dan pencegahan penelantaran dan eksploitasi terhadap anak.

Pada sesi perlindungan anak, dimana maraknya kasus kejahatan terhadap anak belakangan ini membuat khawatir banyak pihak. Untuk itu, pemerintah sangat aktif mengkampanyekan gerakan anti kekerasan dan kejahatan pada anak. Salah satunya melalui sosialisasi di masyarakat, termasuk melalui pelatihan FDS yang disampaikan oleh pendamping FDS-PKH di Kecamatan Tigo Lurah. Diharapkan, nantinya informasi tentang apa dan bagaimana tindak kejahatan dan kekerasan terhadap anak ini bisa dipahami dan diterapkan dari lingkungan paling kecil, yaitu keluarga.

Pemberayaan terhadap perlindungan anak sangat penting karena masih banyak KSM yang melakukan tindakan-tindakan melanggar perlindungan anak dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarganya. Padahal tindakan tersebut jelas melanggar Undang-undang perlindungan anak serta dapat mengganggu perkembangan anak dan anak akan kehilangan hak-hak dasarnya yang nantinya menimbulkan kegagalan dalam pendidikan dan masa depannya. Apabila hal ini tetap dilakukan maka akan menimbulkan rantai kemiskinan pada KSM. Oleh karena itu dengan program ini, sumber daya manusia kita akan berkembang karena Ibu-ibu akan mengandung bayi yang sehat, dapat melahirkan dengan selamat dan balita mendapat imunisasi yang lengkap sehingga angka kematian ibu dan



anak akan turun dengan signifikan. Demikian juga tingkat *drop out* akan menurun dan partisipasi sekolah anak akan naik. Semua itu akan bermuara pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia di masa depan. Disisi lain, KSM juga akan memiliki pengetahuan model pengasuhan anak yang standar sehingga dapat meningkatkan prestasi anak.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan masyarakat dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya. Di masyarakat dan lembaga pendidikan masih banyak anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis yang sehingga diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak. Dalam hal mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, pendamping PKH memiliki peran yang penting sekali untuk memberikakan pemberdayaan kepada KPM untuk menghindari perlakuan kekerasan kepada anak dan memberikan perlindungan kepada anak baik di rumah maupun dilingkungan masyarakat.

Kekerasan anak seringkali pelakunya adalah orang terdekat atau orang yang dikenal anak seperti: paman, kakak, guru, bahkan bisa dilakukan orangtuanya sendiri. Orangtua seringkali menerjemahkan kekerasan yang dilakukannya sebagai bentuk kasih sayang atau salah satu cara mendisiplinkan anak. Selanjutnya, kekerasan tersebut dianggap sebagai “*urusan keluarga*” karena anak adalah “*milik*” orangtuanya, sehingga orang lain/orang luar tidak boleh ikut campur, yang akhirnya kekerasan di dalam rumah tangga seringkali dan sulit untuk dicegah karena berada di area pribadi.

Dengan adanya program PKH yang dilakukan pemerintah, diharapkan akan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial disabilitas anak. Sehingga anak disabilitas dapat memperoleh haknya sebagai seorang manusia yang dapat bereaktivitas dan memperoleh pendidikan yang setara dengan orang lain

Peran pendamping terhadap keluarga miskin penerima manfaat PKH untuk memberdayakan ekonominya. Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan masyarakat bahwa pendamping PKH sebagai pemberdayaan masyarakat memiliki peran fasilitatif, edukatif, representative dan teknik<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Supaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 65.

Dalam tahap ini para aktor / pemberdaya harus memiliki kemampuan inovasi dan *leadership* kuat yang nantinya akan mempengaruhi wawasan, kecakapan, keterampilan dasar yang KPM miliki. Hal ini juga disampaikan oleh Wilson, bahwa siklus pemberdayaan harus mampu mengembangkan kemampuan untuk mengikuti atau mengambil bagian yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan dengan efektif dan efisien untuk menciptakan hasil akhir dari pemberdayaan.

Pemberdayaan menunjukkan pada suatu kondisi dimana seseorang yang termasuk kelompok rentan dan lemah memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka terhindar dari kelaparan, kebodohan dan penyakit dapat mengakses sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan, pelayanan dan barang yang mereka butuhkan, dan mendapatkan partisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka<sup>16</sup>. Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

### **c. Tahap Peningkatan Intelektualitas**

Tahap peningkatan ini merupakan hasil dari tahap penyadaran dan transformasi. Peserta KPM sudah mendapatkan model pemberdayaan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung, serta sudah mulai dan mampu menularkan kebiasaan baiknya pada lingkungan sekitarnya dengan mengajak saudara dan tetangga untuk mulai memperhatikan cara pengasuhan dan pendidikan anak, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak dan sebagainya.

Keberhasilan tahap ini bisa terlihat dari semakin meningkatnya wawasan, inisiatif dan pengetahuan KPM yang biasa hanya bertanggung jawab sebagai pencari nafkah untuk anak-anak sekarang sudah mengambil peranan sebagai yang dicontoh bagi lingkungan sekitar dalam menata kehidupan yang lebih baik. Peningkatan intelektual ini juga membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarganya, merasa diterima kembali di lingkungannya.

---

<sup>16</sup> Edi Suharto, *Pemberdayaan Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin* (Bandung: Alfabeta, 2017), 72.

Dalam tahap ini akan terlihat inovasi-inovasi yang akan dimunculkan oleh para FDS dan juga pendamping di Kecamatan Tigo Lurah, ketika peneliti mengamati proses pemberdayaan, disana terlihat para RTSM antusias dalam menjawab soal-soal yang diberikan, mereka juga terlihat mulai percaya diri. Para peserta FDS sebagian sudah mulai mempraktekan materi-materi yang sudah diajarkan, dalam kehidupan di keluarganya mupun turut menyampaikan pada lingkungan sekitar. Mereka mengaku merasakan perbedaan yang lebih baik ketika mendapatkan banyak ilmu dan informasi dari pelatihan FDS.

Pendudukan di Kecamatan Tigo Lurah kabupaten Solok untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tergantung pada penghasilannya sebagai petani. Penghasilan ini kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hasilnya program pengentasan kemiskinan berupa program PKH dapat membantu meringankan beban hidup mereka meskipun tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi, karena bantuan tersebut hanya diberikan kepada ibu hamil dan anak balita untuk memenuhi kebutuhan gizi dan pada anak sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban keluarga miskin penerima PKH, Karena mereka tidak lagi menyisihkan pendapatan untuk anak sekolah.

Salah satu hasil adanya program FDS di Kecamatan Tigo Lurah, dapat dilihat dari pendapatan masyarakat sasaran pemberdayaan. Dalam keterangan Herman selaku pendamping, setelah adanya program pelatihan dan pengelolaan keuangan dapat memberikan penghasilan bagi ibu-ibu penerima PKH untuk mengelola keuangannya, melakukan kegiatan usaha dari uang yang dikelolanya dengan cara menabung tersebut. Sebagian peserta PKH ada yang membuka usaha dan menyewa lahan untuk digarap secara bersama dengan anggota kelompok. Dananya bersumber dari tabungan yang disisihkan dari bantuan uang dari PKH. Berdasarkan hasil wawancara dengan Buk Gustimar mengemukakan bahwa

“Program PKH ini juga memberikan pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga untuk membuka usaha sendiri. Sebagian peserta ada yang mulai berjualan kecil-kecilan, ada yang menyewa lahan untuk digarap bersama dengan anggota kelompok. Biasanya ibu-ibu ini dulunya ada yang tidak memiliki penghasilan kini mereka dapat memperoleh penghasilan dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini berkat adanya kegiatan FDS yang dilaksanakan oleh Pendamping

Perubahan tersebut juga disampaikan Wilson bahwa peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan telah dirasakan manfaat atau perbaikannya, juga berpotensi untuk melakukan perubahan melalui pemberdayaan sehingga mampu membentuk masyarakat yang maju dan mandiri.

## **2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Berbasis Keluarga (*Family Development Session*)**

Secara detail kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan sosial berbasis keluarga (*Family Development Session*) di Kecamatan Tigo Lurah dapat dibedakan dalam dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Faktor Internal**

*Pertama* Tokoh Masyarakat yang ada di Kecamatan Tigo Lurah tidak pernah dilibatkan oleh pendamping dalam kegiatan FDS. Hal tersebut dikarenakan petugas belum pernah melakukan koordinasi dan sosialisasi mengenai program FDS tersebut di Kecamatan Tigo Lurah.

*Kedua* pembagian kelompok tidak berdasarkan jenis PKH yang diterimanya, seperti pengelompokkan berdasarkan ibu yang punya anak, pengelompok keluarga yang punya lansia, atau pembagian pengelompok ibu hamil, sehingga materi yang diberikan tepat sasaran. Tetapi pada kenyataan dilapangan pengelompok dilakukan secara merata, sehingga materi yang disampaikan tidak menjadi efektif.

Selama melaksanakan program PKH, pada saat penyampaian materi pengasuhan dan pendidikan anak yang hadir pada umumnya ibu-ibu. Padahal ayah juga berperan dalam mengasuh dan mendidik anak. Disamping itu perlindungan anak di dalam keluarga, juga masih kurang. Dimana ayah lebih banyak melakukan kekerasan fisik dan perkataan kasar kepada anak saat lagi emosi. Hal ini menandakan kurangnya pengetahuan ayah tentang perlindungan anak

### **b. Faktor Eksternal**

Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa dukungan pemerintah daerah menyangkut pemberdayaan sosial berbasis keluarga ( FDS ) tidak ada. Hai ini terlihat dari tidak dilaksanakannya rapat koordinasi PKH tingkat kabupaten. Padahal rapat koordinasi sangat penting untuk terciptanya pedoman

dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial berbasis keluarga (FDS). Padahal kebijakan Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di dalamnya juga mengatur hak dan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan rapat koordinasi secara berkala, melakukan evaluasi terhadap program PKH serta untuk mengalokasikan dana dampingan (dana *Sharing*) untuk kegiatan PKH minimal 5% dari dana yang dikucurkan Kementerian Sosial terhadap daerah yang mendapat bantuan PKH setiap tahunnya. Artinya Pelaksanaan FDS hanya mengacu kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Salah satu kebijakan yang diterima adalah berupa SK penetapan tenaga PKH yang didalamnya juga terdapat berbagai tugas dan tanggung jawab dari petugas pendamping PKH. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Solok dalam hal ini Bappeda sebagai ketua pelaksana Tim Koordinasi Teknik Program Keluarga Harapan (PKH) segera melakukan rapat koordinasi tingkat kabupaten dengan mengundang semua stakeholder yang terkait dengan PKH. Rapat koordinasi ini dibutuhkan untuk penguatan pelaksanaan kegiatan ini PKH kedepannya, mengingat PKH ini adalah program lintas sektoral yang melibatkan berbagai instansi pemerintahan sebagai anggota. Diantara instansi yang menjadi anggota dari Tim Koordinasi Teknik PKH di Kabupaten adalah, dinas Pendidikan, dinas Kesehatan, kementerian Agama, BPS, Disnaker, Dukcapil, Kominfo serta lembaga lain yang dibutuhkan.

Berdasarkan keadaan di lapangan ada paradigma bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) ini hanyalah milik Dinas Sosial saja, sehingga lintas sektor lain merasa tidak perlu melibatkan diri lebih jauh. Padahal Dinas Sosial adalah sekretaris dari Tim Koordinasi Teknik Program Keluarga Harapan (PKH).

Kepala Daerah dalam hal ini Bupati merupakan Pembina dan dewan pengarah pada Tim Koordinasi Teknik Program Keluarga Harapan (PKH). Terkait pembentukan Tim Koordinasi Teknik Program Keluarga Harapan (PKH) sebelumnya daerah akan dikirim oleh kementerian sosial berupa surat pemberitahuan kepada kepala daerah. Selanjutnya kepala daerah sebagai dewan pembina dan pengarah mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait untuk pembentukan Tim Koordinasi Teknik Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah Tim Koordinasi Teknik Program Keluarga Harapan (PKH) terbentuk, kemudian Tim ini disahkan oleh kepala daerah dengan

mengeluarkan SK Bupati/walikota. Hasil dari rapat koordinasi tersebut kemudian diinformasikan kepada Ditjen Linjamsos Kementerian Sosial RI.

Kendala lain ialah tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan FDS, yang ada hanya dana dekonsentrasi dari Kementerian Sosial yang disalurkan oleh Dinas Sosial Provinsi kepada pendamping PKH sebagai pelaksana kegiatan FDS di lapangan sebesar Rp. 2.000 000 untuk 15 orang, tentunya jumlah tersebut tidak mencukupi karena jumlah penerima manfaat per masing-masing pendamping PKH berkisar antara 150- 300 orang.

Kendala lain yang ditemukan dilapangan saat penyampaian materi FDS adalah kurangnya sarana dan prasarana diantaranya, tidak semua peserta FDS mendapatkan buku pintar karena keterbatasan pembagian dari kementerian sosial. Pemutaran Film pada beberapa kelompok FDS tidak dapat dilakukan karena tidak adanya sumber listrik untuk pemutaran film tersebut. Karena ada kalanya pertemuan FDS dilakukan di lapangan terbuka yang tidak mempunyai sumber listrik. Selain itu ada juga pendamping PKH yang tidak mempunyai laptop sehingga tidak bisa menampilkan film tentang FDS tersebut. Artinya penyampaian informasi menjadi terbatas dan mempengaruhi hasil yang dilakukan, sehingga peserta menjadi kurang tertarik untuk mengikuti materi secara serius.

Pelaksanaan PKH selama ini memiliki keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana, sehingga hal ini akan berdampak tidak terlaksananya pengampaian materi FDS dengan efektif. Penyediaan sarana dan prasana sangat penting untuk disediakan oleh pemerintah agar tujuan dari materi FDS ini dapat tercapai dengan baik, sehingga proses pembelajaran dan transformasi pengetahuan dapat terlaksana dengan efektif.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Implementasi pemberdayaan sosial berbasis keluarga (*Family Development Session*) di Kecamatan Tigo Lurah bahwa pemberdayaan yang dilakukan dapat dilihat dari tiga tahapan. *Pertama* Tahap kesadaran dan pembentukan prilaku sadar dan peduli sehingga merasa butuh untuk meningkatkan kapasitas diri, *kedua* Tahap tranformasi pengetahuan dan kecakapan agar dapat mengambil peran dalam pembangunan, *tiga* tahap peningkatan kemampuan intelektual untuk mengantar pada kemandirian.

Adapun hambatan pemberdayaan yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya kerjasama sama pendamping dengan tokoh masyarakat, pembagian kelompok FDS tidak berdasarkan komponen. Sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya dukungan pemerintah daerah, belum adanya anggaran khusus, kurangnya sarana dan prasarana.

## Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Supaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Eka Suwinta, Antriya. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar." *Publika* 3, no. 8 (1 November 2016). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/13711>.
- Julian Gonsalves, Thomas Becker, Ann Braun, Dindo Campilan, Hidelisa de Chavez, Elizabeth Fajber, Monica Kaporiri, Joy Rivaca-Caminade, dan Ronnie Vernooy, ed. *Participatory Research and Development for Sustainable Agriculture and Natural Resource Management - A Sourcebook Volume 1: Understanding Participatory Research and Development*. Philippines: International Potato Center-Users' Perspectives With Agricultural Research and Development, 2005.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Operasional Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2011*. Jakarta: Kemensos RI, 2011.
- . *Pedoman Operasional Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2013*. Jakarta: Kemensos RI, 2013.
- . *Pedoman Operasional Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2015*. Jakarta: Kemensos RI, 2015.
- Mardikanto, dan Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Pambid, R. "Level of Application of Family Development Session to Pantawid Pamilyang Pilipino Proram (4P's) Beneficiaries." *PSU Journal Of Education, Management and Sosial Sciences* 1, no. 1 (t.t.): 15–25.
- Rahayu, Sri Lestari. *Bantuan Sosial di Indonesia, Sekarang dan ke Depan*. Bandung: Fokusmedia, 2012.

- Rahmawati, Evi, dan Bagus Kisworo. “Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan.” *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 1, no. 2 (30 Desember 2017): 161–69. doi:10.15294/pls.v1i2.16271.
- Suharto, Edi. *Pemberdayaan Pekerjaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumarto. *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Indeks, 2010.
- Syahyuti. *Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2007.